

## ANALISIS POLA PERDAGANGAN INTERNASIONAL ANTARA NEGARA BERKEMBANG DAN NEGARA MAJU: PENDEKATAN HECKSCHER-OHLIN TERHADAP MODAL DAN TENAGA KERJA

Agustin Nasa Bandiyah, Okta Sofiana Imama, Zumrotul Khusnia, Syahrul Irawan,  
Anang Haris Firmansyah

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

E-mail : [nasyabandiyah@gmail.com](mailto:nasyabandiyah@gmail.com), [oktasofianaa182@gmail.com](mailto:oktasofianaa182@gmail.com),  
[zumrotulkhusnia15@gmail.com](mailto:zumrotulkhusnia15@gmail.com), [irawansyahrul2004@gmail.com](mailto:irawansyahrul2004@gmail.com),  
[anangharisfirmansyah@uinsatu.ac.id](mailto:anangharisfirmansyah@uinsatu.ac.id)

**Abstract :** This study explores international trade relations between developed and developing countries through the lens of the Heckscher-Ohlin theory, which emphasizes differences in the availability of production factors—specifically capital and labor. The theory posits that countries tend to export goods that intensively use the production factors they possess in abundance, and import goods that require relatively scarce factors. The findings indicate that developed countries, with their greater access to capital and advanced technology, are more likely to export capital-intensive goods. In contrast, developing countries, which typically have a surplus of labor, tend to export labor-intensive products. Globalization has further reinforced these patterns by expanding access to international markets, but it also introduces challenges such as increased global competition, dependency on raw material exports, environmental degradation, and social inequality. To address these issues, the study recommends implementing fairer trade policies, enhancing human capital quality, and optimizing domestic capital utilization to achieve more balanced global trade.

**Keywords:** trade patterns, international, developed countries, capital, labor

**Abstrak:** Penelitian ini membahas hubungan perdagangan internasional antara negara maju dan negara berkembang menggunakan pendekatan teori Heckscher-Ohlin, yang menitikberatkan pada perbedaan dalam kepemilikan faktor produksi, khususnya modal dan tenaga kerja. Teori ini menjelaskan bahwa setiap negara akan mengekspor produk yang memanfaatkan faktor produksi yang lebih melimpah di negaranya, dan mengimpor produk yang memerlukan faktor yang langka. Hasil kajian menunjukkan bahwa negara maju cenderung unggul dalam penguasaan modal dan teknologi, sehingga lebih banyak mengekspor barang-barang padat modal. Sebaliknya, negara berkembang memiliki surplus tenaga kerja dan lebih banyak mengekspor produk yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Globalisasi memperkuat kecenderungan ini dengan memperluas akses perdagangan, tetapi juga menimbulkan tantangan seperti meningkatnya persaingan global, ketergantungan pada ekspor bahan mentah, kerusakan lingkungan, serta ketimpangan sosial. Oleh karena itu, diperlukan strategi kebijakan perdagangan yang lebih adil, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan modal secara optimal untuk menciptakan keseimbangan dalam sistem perdagangan internasional.

**Kata kunci:** pola perdagangan, internasional, negara maju, modal, tenaga kerja

### Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 671

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.359

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi saat ini telah mendorong semakin banyak negara untuk ikut serta dalam perdagangan internasional melalui berbagai mekanisme, baik secara multilateral, regional, maupun bilateral. Meskipun mekanisme perdagangan yang ada saat ini sering mendapat kritik karena dianggap lebih menguntungkan negara-negara industri maju, negara-negara berkembang tetap aktif menjalin perjanjian perdagangan dengan negara maju. Perjanjian-perjanjian tersebut biasanya merupakan hasil kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan, kecuali aturan yang berlaku setelah kesepakatan tercapai. Namun, dalam praktiknya, aturan dan tata cara yang mengatur perilaku negara-negara dalam perdagangan internasional banyak ditentukan oleh negara-negara maju. Negara berkembang dihadapkan pada kewajiban untuk mengikuti aturan tersebut, yang sering kali membatasi ruang gerak mereka dalam menegosiasikan ulang ketentuan yang dianggap kurang menguntungkan. Akibatnya, negara-negara berkembang cenderung harus menerima dan mematuhi regulasi yang telah disepakati tanpa banyak pilihan untuk mengubahnya, sehingga menimbulkan ketidaksetaraan dalam sistem perdagangan global.<sup>1</sup>

Meskipun mekanisme perdagangan internasional yang ada dirancang untuk mendorong pertumbuhan bersama, terdapat kecenderungan bahwa sistem perdagangan global lebih menguntungkan negara-negara maju. Negara-negara berkembang tetap aktif menjalin perjanjian perdagangan dengan negara maju, namun sering kali posisi tawar mereka lemah. Aturan dan tata cara perdagangan global banyak ditentukan oleh negara-negara maju, yang menyebabkan negara berkembang harus mengikuti regulasi tersebut meskipun kurang menguntungkan. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam sistem perdagangan global yang perlu dikaji lebih dalam.<sup>2</sup>

Dalam konteks ini, pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pola perdagangan menjadi sangat penting. Salah satu teori utama yang telah lama digunakan untuk menjelaskan pola perdagangan antarnegara adalah teori Heckscher-Ohlin (H-O). Teori ini menyatakan bahwa negara akan mengekspor barang yang produksinya memanfaatkan faktor produksi yang melimpah secara relatif, dan mengimpor barang yang memerlukan faktor produksi yang langka.

Namun, dalam praktiknya, berbagai dinamika ekonomi modern seperti perkembangan teknologi, otomasi, dan mobilitas internasional faktor produksi telah memperumit penerapan teori H-O. Misalnya, negara dengan tenaga kerja melimpah kini dapat memproduksi barang padat modal karena adopsi teknologi canggih. Sebaliknya, mobilitas modal memungkinkan negara berkembang mengakses teknologi dan meningkatkan kapasitas produksinya. Oleh karena itu, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana teori H-O masih relevan dalam menjelaskan pola perdagangan antara negara berkembang dan maju, khususnya dalam konteks perbedaan modal dan tenaga kerja.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa terdapat ketimpangan dalam pola perdagangan antara negara berkembang dan negara maju yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh teori klasik seperti Heckscher-Ohlin. Dinamika ekonomi global yang semakin kompleks menuntut adanya kajian lebih mendalam terhadap faktor-faktor produksi, khususnya modal dan tenaga kerja, dalam membentuk pola perdagangan antarnegara. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul “Analisis Pola Perdagangan antara Negara Berkembang dan

---

<sup>1</sup> Joseph S. Nye Jr., *The Future of Power* (New York: PublicAffairs, 2011), Hlm. 3

<sup>2</sup> Siti Chalimatus Sa'diyah, “Hubungan Antara Ekspor dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 1980–2010” (Skripsi S1, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011), Hlm 1-4, dalam [https://eprints.ums.ac.id/15715/2/BAB\\_I.pdf](https://eprints.ums.ac.id/15715/2/BAB_I.pdf), diakses pada tanggal 2 juni 2025

<sup>3</sup> Darwanto, *Model Perdagangan Hecksher-Ohlin (Teori, Kritik dan Perbaikan)* (Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, 2009), Hlm. 11–12.

Maju: Pendekatan Heckscher-Ohlin terhadap Modal dan Tenaga Kerja”, dengan tujuan untuk mengkaji sejauh mana relevansi dan keterbatasan teori Heckscher-Ohlin dalam menjelaskan hubungan dagang antara kedua kelompok negara tersebut di era globalisasi saat ini.

## KAJIAN PUSTAKA

### Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional merupakan perdagangan yang dilakukan oleh antarnegara atau pemerintah negara dengan negara lainnya yang memiliki suatu hubungan perdagangan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang sedang melakukan perdagangan internasional tersebut. Perdagangan internasional juga bisa didefinisikan sebagai kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar adanya kesepakatan bersama. Penduduk yang menjalani aktivitas perdagangan yang dimaksud berupa antar individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain.

Perdagangan internasional ialah proses tukar-menukar yang didasarkan atas kehendak dari masing-masing negara. Adapun dorongan untuk melakukan perdagangan internasional adalah untuk memperoleh manfaat perdagangan (gains off trade). Perdagangan merupakan aktivitas ekonomi yang sangat penting saat ini, hampir semua negara-negara di dunia yang terlibat di dalam perdagangan, baik perdagangan antarregional, antarkawasan, ataupun antarnegara. Ada berbagai motif mengapa suatu negara atau subjek hukum melakukan transaksi dagang internasional. Perdagangan internasional menjadi suatu acuan bagi negara untuk menjadi makmur, sejahtera, dan kuat.<sup>4</sup>

### Teori Heckscher-Ohlin

Teori Heckscher-Ohlin (H-O), yang dirumuskan oleh dua ekonom asal Swedia, Eli Heckscher dan Bertil Ohlin, sering disebut sebagai teori proporsi faktor atau teori keunggulan komparatif berdasarkan ketersediaan faktor produksi. Inti dari teori ini adalah bahwa perbedaan dalam kelimpahan relatif faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, lahan, dan modal diantara negara-negara, akan memengaruhi struktur perdagangan internasional. Negara akan cenderung mengekspor barang-barang yang proses produksinya membutuhkan faktor produksi yang tersedia melimpah secara relatif di negara tersebut, serta mengimpor barang yang membutuhkan faktor produksi yang lebih langka secara domestik. Dengan demikian, perbedaan proporsi faktor dan kebutuhan faktor dalam proses produksi menjadi dasar utama yang menjelaskan pola perdagangan antarnegara menurut teori ini.<sup>5</sup>

Teori Heckscher-Ohlin menjelaskan bahwa perdagangan internasional pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan perdagangan antar wilayah dalam suatu negara, melainkan merupakan kelanjutan dari aktivitas tersebut. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada aspek geografis, yaitu jarak antarnegara yang lebih besar. Teori ini mampu menggambarkan secara rinci pola-pola perdagangan global, di mana setiap negara cenderung mengekspor barang-barang yang proses produksinya banyak menggunakan faktor produksi yang tersedia melimpah di negara tersebut. Menurut Heckscher dan Ohlin, alasan utama terjadinya perdagangan antarnegara adalah karena masing-masing negara memiliki keunggulan komparatif, yaitu kelebihan dalam hal ketersediaan faktor produksi seperti tenaga kerja, lahan, dan modal, serta pemanfaatan teknologi yang mendukung proses produksi secara efisien.<sup>6</sup>

Teori ini didasarkan pada pemikiran bahwa perdagangan internasional muncul akibat perbedaan *opportunity cost* antara negara. Perbedaan tersebut terjadi karena variasi dalam

---

<sup>4</sup> Serlika Aprita dan Rio Raditya, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2020) Hlm. 1-2

<sup>5</sup> Ririt Iriani Sri Setiawati, *Buku Ajar Bisnis Internasional* (Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2021), Hlm. 24

<sup>6</sup> Soelistyo dan Nopirin, *Ekonomi Internasional* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), Hlm. 26

ketersediaan dan penggunaan faktor produksi, seperti tenaga kerja, modal, tanah, dan bahan mentah, yang tidak merata antarnegara. Dengan kata lain, perdagangan timbul akibat perbedaan kekayaan sumber daya alam di setiap negara.

Pokok utama dari teori H-O terletak pada dua prinsip yaitu pertama, Setiap jenis barang memiliki kebutuhan faktor produksi yang berbeda (*factor requirements*). Kedua, Setiap negara memiliki ketersediaan faktor produksi (*factor endowment*) yang berbeda. Gagasan utama dari teori Heckscher-Ohlin (H-O) bertumpu pada dua prinsip pokok, yaitu: setiap barang memiliki kebutuhan faktor produksi yang berbeda (*factor requirement*), dan setiap negara memiliki ketersediaan faktor produksi (*factor endowments*) yang berbeda-beda. Teori ini didukung oleh beberapa asumsi dasar, antara lain:

1. Perekonomian yang menjadi objek analisis diasumsikan hanya menghasilkan dua jenis komoditas (output), misalnya kain yang dinyatakan dalam satuan meter, dan pangan yang diukur dalam ton.
2. Untuk memproduksi kedua barang tersebut, hanya digunakan dua jenis faktor produksi (input), yakni tenaga kerja yang diukur berdasarkan jam kerja, serta tanah yang dinyatakan dalam satuan hektar.
3. Teknologi yang digunakan dalam proses produksi dianggap tidak mengalami perubahan, atau bersifat konstan.
4. Setiap jenis barang yang diproduksi membutuhkan kombinasi tenaga kerja dan lahan dalam proporsi yang berbeda, sehingga tidak semua komoditas memerlukan jumlah input yang sama.<sup>7</sup>

Teori Heckscher-Ohlin memiliki beberapa hipotesis yaitu : 1. Biaya produksi suatu komoditas ditentukan oleh jumlah dan jenis faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. 2. Negara akan mengurangi produksi barang yang biasanya diimpor dan meningkatkan produksi barang yang diekspor. 3. Jika upah tenaga kerja di dua negara setara, maka harga produk yang sama cenderung tidak jauh berbeda di kedua negara tersebut. 4. Suatu negara akan mengkhususkan diri dalam memproduksi dan mengekspor barang tertentu karena memiliki keunggulan dalam faktor produksi yang melimpah dan murah. 5. Negara dengan kelimpahan tenaga kerja akan cenderung menjalin perdagangan dengan negara yang memiliki kelebihan modal.<sup>8</sup>

## Modal

Modal adalah semua sumber daya hasil produksi yang bersifat tahan lama dan dapat digunakan sebagai input produktif dalam proses produksi selanjutnya.<sup>9</sup> Pengertian modal menurut Nur Inayah, dkk merupakan hasil dari suatu proses produksi yang dimanfaatkan kembali untuk kegiatan produksi berikutnya. Seiring waktu, pengertian modal semakin berkembang dan lebih menitikberatkan pada nilai, kemampuan daya beli, serta otoritas dalam memanfaatkan barang-barang modal.<sup>10</sup> Modal tidak hanya meliputi aset dalam bentuk keuangan saja, tetapi juga mencakup aset fisik seperti mesin, teknologi, dan sarana industri. Peran modal adalah untuk memperbesar kapasitas serta meningkatkan efisiensi proses produksi di berbagai

---

<sup>7</sup> Ririt Iriani Sri Setiawati, *Buku Ajar Bisnis Internasional* (Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, 2021), Hlm. 25—27

<sup>8</sup> Soelistyo dan Nopirin, *Ekonomi Internasional* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), Hlm. 29—31

<sup>9</sup> Sufhayati HS, dkk, *Teori dan Konsep Kewirausahaan*, (Cirebon: Penerbit Insania, 2021) Hlm. 80

<sup>10</sup> Nur Inayah, dkk, *Pengantar Kewirausahaan Mengenal, Memahami, dan Mencintai Dunia Bisnis* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2021) Hlm. 110

bidang.<sup>11</sup> Sehingga dapat disimpulkan salah satu factor produksi utama selain tenaga kerja dalam suatu perekonomian adalah modal. Modal mencakup seluruh sumber daya yang dibuat oleh manusia sehingga dapat digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa, seperti mesin, peralatan, teknologi, serta investasi finansial. Keberadaan dan ketersediaan modal disuatu negara sangat menentukan pola produksi dan perdagangan.

## Tenaga Kerja

Tenaga kerja memiliki peran krusial dalam kegiatan ekonomi karena berperan langsung dalam proses produksi. Untuk menghasilkan produk yang berkualitas, dibutuhkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi tinggi. Produsen dapat memperoleh tenaga kerja tersebut melalui pasar tenaga kerja, yaitu tempat yang menyediakan *input* berupa tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi. Menurut Badan Pusat Statistik, tenaga kerja mencakup seluruh penduduk dalam usia kerja, yakni antara 18 hingga 64 tahun. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja didefinisikan sebagai setiap individu yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk kepentingan pribadi maupun masyarakat. Tenaga kerja merupakan seluruh penduduk yang dinilai mampu dan bersedia bekerja meskipun belum ada permintaan kerja. Peran tenaga kerja sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Berdasarkan tingkat keahlian, kualitas, serta status pekerjaannya, tenaga kerja dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori.<sup>12</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam pola perdagangan antara negara berkembang dan negara maju melalui lensa teori Heckscher-Ohlin. Metodologi penelitian kualitatif sebagai "pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena dari dalam perspektif peserta, dengan fokus pada makna dan konteks".<sup>13</sup> Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena perdagangan internasional secara holistik dan kontekstual tanpa mengandalkan data numerik semata. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur (*library research*), yaitu dengan menelaah berbagai literatur dari berbagai sumber terpercaya seperti jurnal ilmiah, buku teks ekonomi internasional, maupun penelitian terdahulu yang relevan mengenai teori perdagangan internasional, khususnya teori Heckscher-Ohlin, serta data terkait struktur perdagangan negara-negara berkembang dan maju.

## PEMBAHASAN

### Perbedaan Kepemilikan Modal dan Tenaga Kerja Pada Negara Berkembang dan Negara Maju

Salah satu perbedaan ciri-ciri mendasar antara negara maju dan negara berkembang terletak pada struktur kepemilikan dan kelimpahan faktor produksi, khususnya modal dan tenaga kerja. Dalam teori Heckscher-Ohlin (H-O), perbedaan ini menjadi dasar terjadinya spesialisasi dan perdagangan internasional.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Sarah Bakara, dkk, "Teori Heckscher-Ohlin: Model Perdagangan Internasional", *JETBUS: Journal of Education Transportation and Business*, Vol. 1 No. 2, 612—616, 2024, dalam <https://doi.org/10.57235/jetbus.v1i2.4181>, diakses pada tanggal 2 juni 2025, Hlm. 614

<sup>12</sup> Irim Rismi Hastyorini, *Pasar Tenaga Kerja*, (Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2019), hlm. 1—3

<sup>13</sup> Ibnu Sina, *Metodologi Penelitian; Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu Sains*, (Bandung: Widina Media Utama), hlm. 23

<sup>14</sup> Fadli Daud Abdullah, dkk, "Analisis Perdagangan Internasional Melalui Model Politik Heckscher-Ohlin Terhadap Kepentingan Ekonomi Nasional Perspektif Hukum Ekonomi Islam", *Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah dan Hukum*, dalam 10.31958/alushuliy.v2i2.11483, 2 (2):249—259, (2023), Hlm. 252

## a. Kepemilikan Modal

Negara berkembang umumnya mengalami kelangkaan alat-alat modal. Tidak hanya stok modal yang kecil, tingkat pembentukan modalnya pun rendah, dengan investasi bruto hanya sekitar 5-6% dari pendapatan nasional, jauh di bawah negara maju yang mencapai 15-20%. Pertumbuhan modal ini tidak cukup untuk mengejar pertumbuhan penduduk, apalagi jika dialokasikan ke proyek padat modal. Rendahnya modal disebabkan oleh minimnya tabungan, yang berasal dari rendahnya pendapatan per kapita, sehingga investasi dalam produksi juga terbatas.<sup>15</sup> Keterbatasan modal merupakan salah satu ciri daro negara berkembang, karena sumber modal sebagian besar negara berkembang hanya mengandalkan pada investasi dari negara lain. Hal ini disebabkan oleh Tingkat pendapatan yang rendah sehingga Tingkat investasi dan Tabungan di negara berkembang sangat rendah. Sementara itu, pemerintahan negara berkembang lebih mendahulukan pengalokasian pendapatannya untuk mengatasi masalah-masalah sosial, sehingga pemerintah sulit untuk mengalokasikan dananya untuk proyek-proyek ekonomi.<sup>16</sup>

Sedangkan negara-negara maju cenderung memiliki kelimpahan modal yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan sektor industri berteknologi tinggi dan mengeksport berbagai produk padat modal ke pasar global, seperti yang terlihat pada Jepang dan Jerman yang dikenal sebagai pelopor dalam ekspor barang-barang industri.<sup>17</sup> Negara maju memiliki pendapatan perkapita masyarakatnya yang cukup tinggi sehingga mampu mengumpulkan modal begitu juga ketersediaan lapangan pekerjaan yang melimpah dengan Tingkat produktivitas yang tinggi.<sup>18</sup>

## b. Kepemilikan Tenaga kerja

Sebagian besar tenaga kerja negara maju bekerja pada sektor jasa dan industri modern seperti elektronik, mesin, dan teknologi tinggi.<sup>19</sup> Sektor ini memberikan gaji yang relatif tinggi sehingga menjadi penggerak utama dalam perekonomian negara maju. Tenaga kerja di negara maju memiliki produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan negara berkembang. Hal ini disebabkan oleh kualitas tenaga kerja yang lebih baik, penggunaan teknologi modern, serta manajemen dan infrastruktur yang lebih maju.<sup>20</sup> Negara maju memiliki tingkat pengangguran yang rendah dan pertumbuhan penduduk yang lambat, sehingga tenaga kerja yang tersedia cukup dan berkualitas. Namun, karena pertumbuhan penduduk yang rendah, negara maju terkadang mengimpor tenaga kerja dari negara berkembang untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya.

Negara berkembang memiliki kelimpahan tenaga kerja yang tinggi akibat tingginya angka kelahiran dan pertumbuhan penduduk. Kondisi ini menjadikan negara berkembang sebagai sumber tenaga kerja yang potensial, terutama bagi negara maju yang mengalami kekurangan tenaga kerja karena angka kelahiran dan kematian yang rendah. Namun, di balik kelimpahan tersebut, negara berkembang menghadapi tantangan serius dalam hal kualitas sumber daya manusia.<sup>21</sup> Rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya akses pelatihan, serta mutu pendidikan

---

<sup>15</sup> Dewi Fatmasari, *“Ekonomi Pembangunan”*, (Cirebon: Nurjati Press, 2015), hlm. 78

<sup>16</sup> Pekik Nursasongko, dan M. Rofi’I, *“Negara Maju dan Negara Berkembang”* (Klaten: Saka Mitra Kompetensi, 2018) Hlm. 4

<sup>17</sup> Viola Salshabila, dkk, *“Analisis dari Pemanfaatan Modal dan Tenaga Kerja Dalam Perdagangan: Perspektif Heckscher-Ohlin”*, *Jurnal MUSYTARI: Neraca Manajemen, Ekonomi*, 12 (3) (2024), dalam 10.8734/mnmae.v1i2.359, diakses pada tanggal 2 juni 2025, Hlm. 4

<sup>18</sup> Pekik Nursasongko, dan M. Rofi’I, *“Negara Maju dan Negara Berkembang.....”*, Hlm. 2

<sup>19</sup> Fitri Amalia, dkk, *Ekonomi Pembangunan*, (Bandung : WIDINA BHAKTI PERSADA, 2020), Hlm. 108

<sup>20</sup> Roswita Hafni dan Ahmad Rozali, *“Analisis, Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Terhadap Penyerapan di Indonesia”* *EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 15 (2) (2015), dalam <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v15i2.1034>, diakses pada tanggal 2 juni 2025, Hlm. 78

<sup>21</sup> Muhammad Ahmad Sahban, *“Kolaborasi Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang”*, (Makassar: CV SAH MEDIA, 2018), Hlm. 64—65

yang masih minim menyebabkan hanya sebagian kecil tenaga kerja yang memiliki keterampilan memadai untuk bersaing di pasar kerja modern. Dengan demikian, meskipun negara berkembang memiliki potensi tenaga kerja yang besar secara kuantitatif, namun belum sepenuhnya mampu memanfaatkannya secara optimal karena keterbatasan dalam aspek kualitas tenaga kerja.

## Kesesuaian Pola Perdagangan Nyata Negara Berkembang dan Negara Maju: Perspektif Teori H-O

Teori Heckscher-Ohlin (H-O) merupakan teori perdagangan Internasional yang sangat terkenal dalam bidang ekonomi. Teori ini menjelaskan bahwa suatu negara akan mengekspor produk yang memanfaatkan faktor produksi yang relatif berlimpah di negaranya, dan mengimpor produk yang menggunakan faktor produksi yang relatif langka. Dengan kata lain, negara maju yang memiliki banyak modal cenderung mengekspor produk yang membutuhkan modal besar, sedangkan negara berkembang yang memiliki tenaga kerja melimpah cenderung mengekspor produk yang intensif tenaga kerja. Teori adalah pengembangan dari teori keunggulan komparatif Ricardian dengan penambahan dua faktor produksi utama, yaitu modal dan tenaga kerja.<sup>22</sup>

Teori Heckscher-Ohlin (H-O) berlandaskan pada pemikiran bahwa suatu negara cenderung melakukan ekspor terhadap barang-barang yang proses produksinya menggunakan secara intensif faktor produksi yang tersedia dalam jumlah besar dan berbiaya rendah di negara tersebut. Sebaliknya, negara tersebut akan lebih memilih mengimpor produk yang membutuhkan faktor produksi yang relatif langka dan mahal. Teori ini tidak hanya menjelaskan arah dan pola perdagangan antarnegara, tetapi juga mencakup konsep *factor-price equalization theorem*, yaitu teori penyamaan harga faktor produksi. Teorema ini, yang juga dikenal dengan nama Teorema Heckscher-Ohlin-Samuelson, menyatakan bahwa perdagangan internasional dapat mendorong terjadinya kesamaan harga-harga faktor produksi, baik dalam bentuk relatif maupun absolut, di antara negara-negara yang terlibat dalam aktivitas perdagangan tersebut.<sup>23</sup>

Perdagangan internasional memberikan sejumlah keuntungan bagi negara-negara yang menjalin hubungan dagang lintas batas. Keuntungan tersebut antara lain munculnya persaingan global yang mendorong peningkatan efisiensi, berkembangnya spesialisasi dalam produksi barang dan jasa dengan biaya yang lebih rendah, naiknya pendapatan nasional, bertambahnya cadangan devisa, meningkatnya investasi asing yang masuk, serta bertambahnya kesempatan kerja bagi masyarakat. Beberapa faktor mendorong negara-negara melakukan perdagangan luar negeri mencakup: (1) kebutuhan terhadap barang yang tidak bisa dihasilkan di dalam negeri; (2) keinginan untuk mendapatkan teknologi modern dari luar negeri; (3) upaya memperluas pasar untuk produk-produk domestik; dan (4) manfaat ekonomi dari spesialisasi produksi. Meskipun memiliki banyak manfaat, perdagangan internasional juga menimbulkan sejumlah persoalan, terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Di antaranya adalah praktik eksploitasi oleh negara maju, melemahnya industri lokal, kurangnya kontrol terhadap produk impor, ancaman terhadap ketahanan pangan, dan tingginya risiko bagi konsumen. Sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan nasional, banyak negara akhirnya menerapkan berbagai kebijakan penghambat perdagangan, khususnya terhadap barang-barang impor.<sup>24</sup>

Elemen penting yang menentukan kemajuan suatu perekonomian adalah keberadaan sumber daya alam atau lahan. Namun, di negara-negara berkembang, potensi sumber daya

---

<sup>22</sup> Jones, R. W., *Heckscher-Ohlin Trade Theory*. (Amerika Serikat: Princeton University Press, 2006), Hlm. 9

<sup>23</sup> Hilmi Rahman Ibrahim dan Hamka Halkam, *Perdagangan Internasional & Strategi Pengendalian Impor*, (Jakarta Selatan: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional, 2021), Hlm. 7—8

<sup>24</sup> *Ibid.*, Hlm. 10

alam ini sering kali tidak dimanfaatkan secara optimal karena adanya keterbatasan teknologi dan rendahnya kualitas sumber daya manusia.<sup>25</sup> Faktor sosial dan budaya turut berperan dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Di negara-negara berkembang, sering kali terdapat tradisi sosial dan budaya yang justru menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, dalam proses Pembangunan ekonomi negara, diperlukan keberadaan masyarakat yang merdeka serta kelas menengah yang tangguh, yang dapat mendorong peningkatan pendapatan melalui kegiatan perdagangan dan bisnis yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi modern di negara-negara maju.<sup>26</sup>

Masuknya berbagai jenis dan jumlah barang impor ke dalam suatu negara merupakan kondisi yang sulit untuk dihindari. Dalam era globalisasi dan modernisasi seperti saat ini, kebutuhan dalam negeri tidak selalu bisa dipenuhi secara mandiri melalui produksi lokal. Barang impor pun memegang peranan penting dalam pemenuhan konsumsi, terutama karena negara berkembang seperti Indonesia masih belum sepenuhnya mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. Selain itu, kegiatan impor sering kali lebih efisien dibandingkan dengan memproduksi barang tersebut secara lokal.<sup>27</sup>

Namun demikian, perdagangan Internasional juga membawa sejumlah tantangan dan hambatan, khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia. Beberapa di antaranya meliputi eksploitasi terhadap negara berkembang, runtuhnya industri dalam negeri, menurunnya keamanan produk, ancaman terhadap ketahanan pangan, serta risiko bagi keselamatan konsumen. Oleh karena itu, demi melindungi kepentingan nasional, berbagai negara berupaya menerapkan berbagai bentuk hambatan perdagangan, terutama terhadap produk impor.<sup>28</sup>

Negara-negara berkembang cenderung memilih kebijakan substitusi impor karena hingga dekade 1970-an masih terdapat keraguan terhadap kemampuan mengeksport produk manufaktur. Oleh karena itu, upaya industrialisasi difokuskan pada pengembangan industri dalam negeri untuk menggantikan kebutuhan impor. Selain itu, di wilayah seperti Amerika Latin, kebijakan ini muncul secara alami sebagai respons terhadap pengalaman buruk akibat krisis ekonomi sebelumnya yang disebabkan oleh ketergantungan pada impor (Krugman dan Obstfeld, 2003). Kebijakan ini sangat populer pada era 1950 hingga 1960-an, namun kini telah banyak ditinggalkan seiring dengan meningkatnya liberalisasi perdagangan.

Meskipun perdagangan bebas sering dianggap sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi, kenyataannya masih banyak bukti yang menunjukkan bahwa dampaknya terhadap lonjakan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara relatif terbatas. Salah satu negara yang berhasil menerapkan kebijakan perdagangan yang efektif adalah India. Negara ini mulai membuka diri terhadap perdagangan Internasional pada tahun 1984, setelah sebelumnya menerapkan kebijakan substitusi impor yang kurang menguntungkan. Pada masa pemerintahan Perdana Menteri Rajiv Gandhi, 25 sektor industri dikecualikan dari kebijakan substitusi impor, dan pada tahun 1991, Perdana Menteri Narasimha Rao memperluas proses liberalisasi ke seluruh sektor industri serta mengundang investasi asing. Saat ini, India dikenal luas melalui sektor teknologi informasinya yang menjadi acuan dan mitra kerja negara-negara maju. Walaupun pertumbuhan GDP India mengalami pasang surut, perekonomian negara tersebut kini menduduki posisi yang kuat secara global.

Secara umum, kebijakan ekonomi suatu negara berkaitan erat dengan kebijakan ekonomi domestik maupun Internasional. Di negara-negara maju, keterlibatan pemerintah dalam perkembangan ekonomi cenderung minimal. Pemerintah hanya terlibat dalam urusan yang bersifat publik dan Nasional, seperti pembangunan infrastruktur (jalan raya, rel kereta api,

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, Hlm. 14

<sup>26</sup> *Ibid.*, Hlm. 16

<sup>27</sup> *Ibid.*, Hlm. 37

<sup>28</sup> *Ibid.*, Hlm. 57

pelabuhan) serta perlindungan industri dalam negeri melalui tarif dan subsidi. Sementara itu, di negara berkembang, karena keterbatasan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya, pemerintah diharapkan berperan lebih aktif.

Di sisi lain, negara-negara berkembang menerapkan kebijakan ekonomi luar negeri melalui perdagangan Internasional guna melindungi industri domestik, seperti dengan penerapan proteksi, tarif, subsidi, dan sistem nilai tukar ganda. Selain itu, kebijakan tersebut juga mencakup bantuan teknis, seperti pelatihan bagi teknisi serta penyediaan fasilitas berupa tenaga ahli, peralatan, dan pengorganisasian layanan yang mendukung pembangunan ekonomi pemerintah.<sup>29</sup>

## Hubungan Dagang antara Negara Berkembang dan Negara Maju

Hubungan dagang antara negara maju dan negara berkembang sangat dipengaruhi oleh perbedaan fundamental dalam aspek ekonomi dan sosial. Negara berkembang umumnya memiliki tingkat pendapatan per kapita yang lebih rendah, infrastruktur yang belum memadai, sektor industri yang belum sepenuhnya berkembang, serta keterbatasan akses terhadap teknologi. Sebaliknya, negara maju memiliki karakteristik ekonomi yang lebih mapan, dengan pendapatan tinggi, infrastruktur modern, industri yang kuat, dan akses teknologi yang lebih luas. Kondisi ini menyebabkan pola perdagangan internasional yang tidak seimbang, di mana negara berkembang cenderung menjadi pengimpor utama barang dan jasa, sementara negara maju mendominasi sebagai eksportir. Di samping itu, faktor sosial seperti budaya, norma, dan hubungan diplomatik turut memengaruhi preferensi konsumen, investasi, serta dinamika dagang antarnegara.

Perbedaan mendasar antara negara berkembang dan negara maju dapat dilihat dari berbagai aspek, terutama dalam karakteristik ekonomi yang secara langsung memengaruhi posisi dan peran mereka dalam perdagangan internasional. Negara maju umumnya memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, yang mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat serta daya beli yang lebih besar terhadap barang dan jasa. Sebaliknya, negara berkembang masih berada pada tingkat pendapatan per kapita yang relatif rendah. Dari segi struktur ekonomi, negara maju memiliki sektor industri dan jasa yang telah berkembang dan terdiversifikasi, sementara negara berkembang masih sangat bergantung pada sektor pertanian serta ekspor komoditas mentah dan sumber daya alam. Dalam hal inovasi dan teknologi, negara maju menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam pengembangan serta adopsi teknologi baru, yang berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas perdagangan. Sebaliknya, negara berkembang umumnya mengalami keterlambatan dalam hal inovasi, yang menghambat daya saing mereka di pasar global. Selain itu, perbedaan juga terlihat dalam kualitas infrastruktur. Negara maju memiliki sistem transportasi, komunikasi, dan layanan publik yang baik, sehingga mendukung kelancaran aktivitas perdagangan internasional. Sementara itu, negara berkembang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, yang menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya memperluas dan memperkuat hubungan dagangnya secara global.<sup>30</sup>

Ketimpangan ini tidak hanya terjadi pada aspek domestik masing-masing negara, tetapi juga tercermin dalam sistem perdagangan internasional yang diatur oleh lembaga multilateral seperti World Trade Organization (WTO). Implementasi kebijakan dalam kerangka World Trade Organization (WTO) sering kali menimbulkan ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang, termasuk negara-negara miskin. Negara-negara berkembang telah berulang kali meminta evaluasi terhadap pelaksanaan berbagai perjanjian perdagangan internasional guna menciptakan sistem yang lebih adil dan seimbang. Namun, permintaan tersebut kerap ditolak

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, Hlm. 65—67

<sup>30</sup> Muhammad Dwi Arif, "Pola Perdagangan Internasional dalam Era Globalisasi Sebuah Kajian Deskriptif," *Jurnal Pendidikan Manajemen Transportasi* 4, no. 3 (2024), Hlm 4.

oleh negara maju yang lebih dominan dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sistem perdagangan global masih cenderung berpihak pada kepentingan negara-negara kaya.

Dalam praktiknya, sejumlah kebijakan dan ketentuan WTO justru menguntungkan negara maju serta memfasilitasi kepentingan bisnis dan korporasi besar yang berasal dari wilayah tersebut. Hal ini terlihat dari proses negosiasi, klausul, hingga peraturan yang secara implisit memperkuat dominasi ekonomi mereka. Negara-negara maju juga melakukan berbagai strategi untuk mempertahankan posisi unggul mereka, yang berdampak pada semakin lebarnya kesenjangan antara mereka dan negara berkembang. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa hubungan dagang internasional masih menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan keadilan dan keseimbangan global.<sup>31</sup>

Hubungan dagang antara negara maju dan negara berkembang merupakan dinamika kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, politik, dan teknologi. Di satu sisi, perdagangan internasional menawarkan peluang besar bagi negara berkembang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan melalui akses pasar yang lebih luas. Namun di sisi lain, ketimpangan struktural, dominasi negara maju dalam lembaga-lembaga internasional, serta distribusi keuntungan yang tidak merata kerap menjadi hambatan dalam menciptakan hubungan dagang yang adil dan setara. Negara-negara maju sering kali memiliki keunggulan dalam hal teknologi, infrastruktur, serta kekuatan tawar menawar, sehingga berpotensi memperkuat ketergantungan negara berkembang dalam sistem perdagangan global. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dan mekanisme regulasi yang adil, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Kolaborasi yang saling menguntungkan, penguatan kapasitas negara berkembang, serta peninjauan ulang terhadap ketentuan perdagangan internasional seperti yang diatur oleh WTO, menjadi langkah penting guna menciptakan sistem perdagangan global yang lebih seimbang, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi semua pihak.

## **Dampak Globalisasi Pola Perdagangan Komoditas Modal dan Tenaga Kerja**

### **1 Dampak Globalisasi Terhadap Perdagangan Komoditas**

Globalisasi telah menciptakan dunia yang makin terhubung, di mana batas-batas geografis tidak lagi menjadi penghalang utama dalam pertukaran barang, termasuk komoditas. Perdagangan komoditas merupakan salah satu sektor yang paling terdampak dari integrasi ekonomi global ini. Komoditas yang dimaksud di sini meliputi barang-barang bernilai ekonomi tinggi seperti hasil pertanian, kehutanan, pertambangan, serta produk industri dasar yang biasanya menjadi tulang punggung ekspor negara berkembang.

Dalam konteks Indonesia, globalisasi telah mendorong negara ini untuk lebih aktif di pasar internasional. Produk-produk seperti kelapa sawit, kopi, batubara, karet, dan hasil laut menjadi komoditas andalan yang sangat bergantung pada dinamika perdagangan global. Seiring keterbukaan pasar dunia, terjadi peningkatan volume ekspor yang signifikan, yang pada gilirannya berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan devisa negara.<sup>32</sup>

#### **a. Dampak Positif**

Salah satu manfaat nyata dari globalisasi dalam konteks perdagangan komoditas adalah terbukanya akses pasar internasional secara lebih luas. Produsen dalam negeri tidak hanya melayani pasar lokal, tetapi juga bisa menjangkau konsumen mancanegara dengan lebih mudah. Hal ini tentunya meningkatkan pendapatan nasional dan memperluas peluang ekspor Indonesia.

---

<sup>31</sup> Aam Slamet Rusydiana, "Perdagangan Internasional: Komparasi Teori Ekonomi Modern dengan Perspektif Islam" *Jurnal Perdagangan Internasional*, Vol 1, 2018, Hlm. 12.

<sup>32</sup> Intan Harahap, dkk. "Analisis Dampak Globalisasi Terhadap Perdagangan Internasional", *JLEB: Journal of Law Education and Business*, 2024, hlm. 162.

Globalisasi juga memicu efisiensi produksi. Melalui prinsip keunggulan komparatif, negara akan berfokus pada produksi barang-barang yang bisa dihasilkan secara optimal, baik dari segi biaya maupun sumber daya. Misalnya, Indonesia dikenal sebagai produsen utama kelapa sawit karena memiliki kondisi iklim dan tanah yang mendukung. Dalam sistem global, negara lain yang tidak memiliki keunggulan serupa akan lebih memilih mengimpor dari Indonesia daripada memproduksinya sendiri.<sup>33</sup>

Selain itu, meningkatnya standar dan tuntutan pasar global secara tidak langsung mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk. Produsen dituntut memenuhi regulasi dan sertifikasi internasional agar produknya diterima di pasar global. Kondisi ini mendorong penggunaan teknologi produksi yang lebih baik, pengelolaan mutu yang ketat, serta inovasi produk secara berkelanjutan.<sup>34</sup>

## b. Dampak Negatif

Meskipun membawa sejumlah keuntungan, globalisasi juga menghadirkan tantangan besar bagi perdagangan komoditas. Salah satu yang paling mencolok adalah ketatnya persaingan global, yang memaksa produsen lokal bersaing dengan produk luar negeri. Barang-barang impor yang lebih murah dan berkualitas tinggi dapat menguasai pasar domestik, sehingga produk lokal kesulitan untuk bertahan.<sup>35</sup>

Selain itu, sebagian besar ekspor Indonesia masih didominasi oleh komoditas mentah atau setengah jadi. Ketergantungan terhadap ekspor bahan baku membuat struktur ekonomi menjadi kurang kokoh. Nilai tambah produk sering kali diambil oleh negara tujuan ekspor yang mengolahnya menjadi barang jadi. Ketika harga komoditas global jatuh, pendapatan negara pun ikut tertekan, dan ini berdampak langsung pada petani, buruh, serta sektor informal yang menggantungkan hidup pada industri tersebut.<sup>36</sup>

Dampak lain yang tak bisa diabaikan adalah kerusakan lingkungan. Tuntutan pasar global terhadap produk dalam jumlah besar sering kali membuat produsen menambah luas lahan pertanian atau mempercepat proses produksi tanpa memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Ini bisa menyebabkan deforestasi, degradasi tanah, pencemaran air, dan hilangnya keanekaragaman hayati, terutama di sektor pertanian dan pertambangan.<sup>37</sup>

## 2 Dampak Globalisasi Terhadap Tenaga Kerja

Globalisasi tidak hanya berdampak pada perdagangan barang, tetapi juga pada dinamika tenaga kerja. Dalam era pasar terbuka, tenaga kerja dituntut untuk lebih fleksibel, terampil, dan siap bersaing dalam lingkup global. Pergerakan manusia antarnegara, baik sebagai pekerja migran maupun tenaga profesional, menjadi fenomena yang semakin lumrah dalam struktur ekonomi global. Fenomena ini menciptakan dampak yang sangat kompleks, baik secara ekonomi maupun sosial.

### a. Dampak Positif

Salah satu dampak paling terlihat dari globalisasi di bidang ketenagakerjaan adalah terbukanya peluang kerja lintas negara. Banyak warga Indonesia yang kini bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja migran di sektor informal (seperti asisten rumah tangga, pekerja kebun, buruh bangunan), maupun di sektor formal (seperti perawat, teknisi, bahkan profesional IT). Kehadiran mereka tidak hanya membantu perekonomian keluarga, tetapi juga menyumbang

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, Hlm. 163

<sup>34</sup> Novia C. Tampubolon, dkk. (2024). "Analisis Dampak Globalisasi Terhadap Perdagangan Internasional", *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 2024, hlm. 529.

<sup>35</sup> *Ibid.*, Hlm. 530

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 532.

<sup>37</sup> Intan Harahap, dkk. "Analisis Dampak Globalisasi Terhadap Perdagangan Internasional.....", Hlm. 164

signifikan terhadap pemasukan negara dalam bentuk remitansi (pengiriman uang ke tanah air).<sup>38</sup>

Globalisasi juga memungkinkan transfer pengetahuan dan keterampilan dari luar negeri ke dalam negeri. Masuknya tenaga ahli asing yang bekerja di perusahaan-perusahaan multinasional di Indonesia sering kali membawa inovasi, pendekatan baru dalam manajemen, serta pelatihan kepada pekerja lokal. Ini berdampak pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia, terutama di sektor industri dan teknologi.

Selain itu, meningkatnya tuntutan kompetensi akibat globalisasi mendorong lembaga pendidikan dan pelatihan untuk menyesuaikan kurikulum mereka. Hal ini menumbuhkan kesadaran pentingnya pendidikan vokasional, pelatihan keterampilan digital, dan penguasaan bahasa asing untuk menunjang kesiapan tenaga kerja bersaing di pasar internasional<sup>8</sup>.

## b. Dampak Negatif

Namun, seiring dengan terbukanya peluang, muncul pula tantangan besar. Salah satu yang paling menonjol adalah meningkatnya persaingan kerja, baik dari tenaga kerja asing maupun sesama pekerja domestik. Persaingan ini dapat menyebabkan terpinggirkannya pekerja lokal yang tidak memiliki keterampilan memadai. Kondisi ini diperparah jika regulasi perlindungan tenaga kerja belum berjalan optimal.

Globalisasi juga melahirkan fenomena brain drain, yaitu migrasi besar-besaran tenaga profesional Indonesia ke luar negeri. Banyak lulusan terbaik memilih bekerja di negara lain karena iming-iming gaji tinggi dan jenjang karier yang lebih baik. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menciptakan kekosongan tenaga ahli di dalam negeri, yang seharusnya dapat mendukung pembangunan nasional.

Ketimpangan sosial juga dapat semakin melebar karena hanya sebagian kecil masyarakat terutama mereka yang berpendidikan tinggi dan memiliki akses yang mampu menikmati manfaat dari pasar kerja global. Sementara itu, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan berpendidikan minim cenderung tertinggal dan sulit beradaptasi dengan perubahan ini.<sup>39</sup>

## KESIMPULAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa perbedaan kepemilikan faktor produksi, terutama modal dan tenaga kerja, menjadi landasan utama dalam pembentukan pola perdagangan internasional antara negara maju dan negara berkembang, sebagaimana dijelaskan dalam teori Heckscher-Ohlin. Negara-negara maju dengan keunggulan modal cenderung mengeksport produk yang membutuhkan investasi tinggi, sedangkan negara-negara berkembang dengan kelebihan tenaga kerja lebih fokus pada ekspor barang-barang yang intensif tenaga kerja.

Pola spesialisasi ini mencerminkan upaya negara untuk memaksimalkan potensi sumber daya yang dimiliki. Namun demikian, penerapan teori ini dalam kenyataan tidak selalu sejalan dengan prediksi, karena terdapat pengaruh dari aspek teknologi, kualitas sumber daya manusia, kebijakan ekonomi, serta ketimpangan struktur ekonomi antarnegara.

Globalisasi memperkuat keterkaitan perdagangan antarnegara, namun juga menghadirkan tantangan serius, seperti ketergantungan terhadap ekspor komoditas mentah, tekanan kompetitif dari pasar global, dan dampak negatif terhadap lingkungan. Di sektor tenaga kerja, globalisasi membuka peluang baru melalui mobilitas kerja lintas negara dan transfer keterampilan, tetapi juga memunculkan risiko seperti persaingan kerja dan hilangnya tenaga ahli (brain drain).

Untuk menjawab tantangan tersebut, negara berkembang perlu memperkuat fondasi ekonomi melalui peningkatan kualitas tenaga kerja, penguasaan teknologi, pembangunan infrastruktur yang mendukung, serta penyusunan kebijakan perdagangan yang adaptif dan inklusif. Di sisi lain, diperlukan pula reformasi dalam sistem perdagangan global agar tercipta

---

<sup>38</sup> Novia C. Tampubolon, dkk. (2024). "Analisis Dampak Globalisasi Terhadap....., Hlm. 534

<sup>39</sup> *Ibid.*, Hlm. 164

tatanan ekonomi internasional yang lebih adil, seimbang, dan mampu mendukung pembangunan berkelanjutan di seluruh negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, F. D., dkk. (2023). Analisis perdagangan internasional melalui model politik Heckscher-Ohlin terhadap kepentingan ekonomi nasional perspektif hukum ekonomi Islam. *Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah dan Hukum*, 2(2), 249-259. <https://doi.org/10.31958/alushuliy.v2i2.11483>
- Amalia, F., dkk. (2020). *Ekonomi pembangunan*. Bandung: WIDINA BHAKTI PERSADA.
- Aprita, S., & Raditya, R. (2020). *Hukum perdagangan internasional*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Bakara, S., dkk. (2024). Teori Heckscher-Ohlin: Model perdagangan internasional. *JETBUS: Journal of Education Transportation and Business*, 1(2), 612-616. <https://doi.org/10.57235/jetbus.v1i2.4181>
- Darwanto. (2009). *Model perdagangan Hecksher-Ohlin (Teori, kritik dan perbaikan)*. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
- Fatmasari, D. (2015). *Ekonomi pembangunan*. Cirebon: Nurjati Press.
- Harahap, I., dkk. (2024). Analisis dampak globalisasi terhadap perdagangan internasional. *JLEB: Journal of Law Education and Business*, 2024, 162.
- Hastyorini, I. R. (2019). *Pasar tenaga kerja*. Klaten: Penerbit Cempaka Putih.
- Hafni, R., & Rozali, A. (2015). Analisis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap penyerapan di Indonesia. *EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 15(2), 78. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v15i2.1034>
- Ibrahim, H. R., & Halkam, H. (2021). *Perdagangan internasional & strategi pengendalian impor*. Jakarta Selatan: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional.
- Inayah, N., dkk. (2021). *Pengantar kewirausahaan: Mengenal, memahami, dan mencintai dunia bisnis*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Jones, R. W. (2006). *Heckscher-Ohlin trade theory*. Princeton: Princeton University Press.
- Nursasongko, P., & Rofi'i, M. (2018). *Negara maju dan negara berkembang*. Klaten: Saka Mitra Kompetensi.
- Nye, J. S. Jr. (2011). *The future of power*. New York: PublicAffairs.
- Rahman, M. D. A. (2024). Pola perdagangan internasional dalam era globalisasi sebuah kajian deskriptif. *Jurnal Pendidikan Manajemen Transportasi*, 4(3), 4.
- Rismi Hastyorini, I. (2019). *Pasar tenaga kerja*. Klaten: Penerbit Cempaka Putih.
- Rusydiana, A. S. (2018). Perdagangan internasional: Komparasi teori ekonomi modern dengan perspektif Islam. *Jurnal Perdagangan Internasional*, 1, 12.
- Sa'diyah, S. C. (2011). *Hubungan antara ekspor dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1980-2010* (Skripsi S1, Universitas Muhammadiyah Surakarta). [https://eprints.ums.ac.id/15715/2/BAB\\_I.pdf](https://eprints.ums.ac.id/15715/2/BAB_I.pdf)
- Sahban, M. A. (2018). *Kolaborasi pembangunan ekonomi di negara berkembang*. Makassar: CV SAH MEDIA.
- Salshabila, V., dkk. (2024). Analisis dari pemanfaatan modal dan tenaga kerja dalam perdagangan: Perspektif Heckscher-Ohlin. *Jurnal MUSYTARI: Neraca Manajemen, Ekonomi*, 12(3), 4. <https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359>
- Setiawati, R. I. S. (2021). *Buku ajar bisnis internasional*. Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- Setiawati, R. I. S. (2021). *Buku ajar bisnis internasional*. Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- Sina, I. (n.d.). *Metodologi penelitian: Kualitatif dan kuantitatif untuk ilmu sains*. Bandung: Widina Media Utama.
- Soelistyo & Nopirin. (2021). *Ekonomi internasional*. Medan: Yayasan Kita Menulis.

Soelistyo & Nopirin. (2021). *Ekonomi internasional*. Medan: Yayasan Kita Menulis.  
Sufhayati, H. S., dkk. (2021). *Teori dan konsep kewirausahaan*. Cirebon: Penerbit Insania.  
Tampubolon, N. C., dkk. (2024). Analisis dampak globalisasi terhadap perdagangan internasional. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 2024, 529.